



Penutupan PPRA XLIX Lemhannas RI

Kamis, (12/9) Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA. di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. (bersambung ke hal. 3...)

Sosialisasi Pengelolaan Manajemen Risiko



Foto: Humas Lemhannas RI

“Penilaian risiko merupakan acuan yang memberi arah bagi lembaga dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan unsur tersebut.”

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Inspektur Lemhannas RI, Irjen Polisi, Jhony Mangasi Samosir, perlunya sosialisasi “Pengelolaan Manajemen Risiko” yang berlangsung pada hari Senin, (16/9) di Gedung Astagatra Lt. III Timur Lemhannas RI.

Hadir sebagai narasumber adalah Kasubditwas Setya Nugraha, Auditor Ahli Madya Ida Agustina, Auditor Ahli Muda Sebastianus Wawor, dan Auditor Pelaksana Lanjutan Putu Ayu Diah Triyanti dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para pejabat struktural Lemhannas RI dan segenap personil Lemhannas RI ini, bertujuan agar seluruh peserta yang berasal dari unit kerja dapat lebih memahami dan mendalami secara utuh mengenai makna dan perlunya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif bagi suatu organisasi, dalam hal ini Lemhannas RI sendiri.

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), selain unsur lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantau pengendalian intern. Untuk membangun lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif dimana menjadi kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansi dan unit kerjanya masing-masing.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan manajemen risiko.

Diharapkan dengan dilaksanakannya pengelolaan manajemen risiko di Lemhannas RI, dapat diminimalisir segala risiko yang mungkin timbul. Penerapan sistem pengendalian intern dapat menjadi sebuah dukungan agar kinerja Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 dapat semakin efektif, efisien dan akuntabel.

DAFTAR ISI



2 Sosialisasi Pengelolaan Manajemen Risiko



3 Penutupan PPR XLIX Lemhannas RI



4 Pulau Terluar Belum Berdaya Optimal



5 Studi Strategis Dalam Negeri PPR L Lemhannas RI



6 Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba



7 Partisipasi Publik dan Etika Berpolitik Penting Dioptimalkan



8 Workshop “Ketahanan Nasional dan isu Strategis”



8 Revitalisasi Kearifan Lokal Perkuat Karakter Bangsa



9 Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Lemhannas RI



10 Olah Sistem Manajemen Nasional PPR XXXIX PPR L Lemhannas RI



11 Konsolidasi Politik Pra Pemilu 2014 Perlu Ditingkatkan



11 Lemhannas RI - NDU Korea Terus Perkuat Hubungan Kerja Sama



12 Berkorban, Bentuk Solidaritas dan Kepedulian Sosial

REDAKSI

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Laksma TNI E. Estu Prabowo

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Maghoni.

Redaktur Pelaksana :

Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.

Desain

Bambang Iman Aryanto, S.T.

Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Suryadi.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Letkol Caj G.T. Situmorang, Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono, Peltu (K) Fransisca.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110, Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926, Website <http://www.lemhannas.go.id>

Penutupan PPRA XLIX Lemhannas RI

Kamis, (12/9) Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lemhannas RI secara resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA. di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Program Pendidikan yang dibuka sejak 5 Februari lalu, telah melakukan rangkaian proses panjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bekal dan penguatan terhadap enam core inti Lemhannas RI yang meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional, Kepemimpinan Nasional dan Kewaspadaan Nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada peserta yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, kekompakan dan komitmennya selama pendidikan.

Pada upacara penutupan ini, Lemhannas RI telah memberikan penghargaan Wibawa Seroja Nugraha kepada Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo (Lemhannas RI), Prof. Djagal Wisoso Marseno, M. Agr. (Universitas Gadjah Mada-Kemendikbud RI), Dr. Dadang Solihin, SE, MA (Bappenas RI) dan Tony Tribagus Spontana, SH, M.Hum (Lemhannas RI).

Sementara Predikat Andalan diberikan kepada Kombes Pol Drs. Asep Suhendar, M.Si (Polri), Dr. A. Hasanudin, ME (Kemen PU RI), Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH,MH. (SKK Migas), Kombes Pol Andjar Dewantoro, SH, MBA. (Polri), Dr. Faizul Ishom, M. Eng. Kemen PDT RI, Dr.Ir. Muhammad Sadly, M.Eng. (BPPT RI), Marsma TNI Baskoro Alrianto, M.Sc. (Lemhannas RI), Kolonel Arm Muhammad Nakir (TNI AD), dan penghargaan Predikat Andalan Khusus diberikan kepada peserta Negara sahabat yakni Chief. Supt. Drs. Mateus Fernandes, M.Sc. dari Negara Timor Leste.

Dengan berakhirnya program pendidikan ini, Lemhannas RI menaruh harapan besar kepada seluruh Alumnus PPRA XLIX, untuk



Foto : Humas Lemhannas RI

dapat mengimplementasikan seluruh ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh selama pendidikan.

Gubernur Lemhannas RI pun berharap pemahaman dan cara berpikir komprehensif,

integral, sistemik dan holistik senantiasa dapat menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan publik sesuai medan penugasan sesungguhnya di lingkungan kerja masing-masing.



Pulau Terluar Belum Berdaya Optimal

Selasa, (17/9), Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* bidang Pertahanan Keamanan di Gedung Astagatra Lt. IV Barat.

Roundtable Discussion yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA kali ini mengangkat tema "Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar guna Memelihara Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam rangka Menjaga Kedaulatan NKRI".

Acara yang dimoderatori oleh Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar ini menghadirkan narasumber, seperti Kepala PKSPL-IPB-Bogor Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS dan Dirwiltas Dirjen PUM Kemendagri RI Drs. Eko Subowo, MBA sebagai Pembicara. Sementara sebagai Penanggap, hadir Kadis Hidro Oseanografi TNI AL Laksma TNI Aan Kurnia, S.Sos, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, dan Tenaga Ahli Pengajar Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggadirja.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan, memiliki 17.504 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang tersebar di segala penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga. PPKT sendiri merupakan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki potensi sumber kekayaan alam dan jasa lingkungan yang tinggi, seperti terumbu karang, hutan mangrove dan perikanan.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, PPKT juga memiliki nilai yang strategis bila dilihat dari sudut pertahanan, karena dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah NKRI dan sebagai titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan

wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen. Ia juga melihat kondisi pulau terluar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga kini masih merupakan daerah tertinggal dan masih memiliki kerawanan yang tinggi.

Selama ini, sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pengelolaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi yang melibatkan 20 Kementerian.

Gubernur Lemhannas RI menilai belum adanya peningkatan kondisi pulau-pulau kecil terluar tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan oleh kurangnya sinergisme dari Kementerian terkait. "kementerian yang masing-masing memiliki program kerja dan anggaran untuk membangun wilayah pulau-pulau kecil terluar, namun melihat kondisi faktual, masih belum adanya peningkatan", terangnya.

Diharapkan *Roundtable Discussion* ini dapat menghasilkan pemikiran dan gagasan baru bagaimana memberdayakan pulau-pulau kecil terluar ini dan langkah-langkah strategis guna menyempurnakan kajian yang dilakukan Lemhannas RI.

Acara *Roundtable Discussion* ini turut dihadiri oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, beberapa Pejabat Struktural dan beberapa Peserta PPSA XIX Lemhannas RI serta undangan lainnya.



Foto : SSDN PPRA L - Aceh

Studi Strategis Dalam Negeri PPRA L Lemhannas RI

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L Lemhannas RI, melaksanakan Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) selama satu pekan, sejak tanggal 16 s.d. 20 September 2013. SSDN PPRA L Lemhannas RI terbagi dalam tiga rombongan dengan tiga tujuan daerah yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

SSDN sendiri merupakan sebuah metode pembelajaran dengan melakukan peninjauan langsung ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) baik ke pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan lainnya, serta objek/produk unggulan dari suatu daerah/provinsi di Indonesia.

Dalam kunjungan SSDN ke Aceh, rombongan peserta SSDN PPRA L Lemhannas RI melakukan kunjungan ke berbagai instansi daerah, seperti Pemerintah Provinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR A), Pemerintah Kota Banda Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPR K) Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Banda Aceh, Kodam I/Iskandar Muda, Polda Aceh. Selain itu, rombongan juga mengunjungi Universitas Syiah Kuala, PT Lafarge Cement Indonesia, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), PLTD Apung, Museum Tsunami, dan Tugu Titik Nol KM.

Sementara di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi salah satu tujuan SSDN PPRA L Lemhannas RI, rombongan SSDN juga melakukan

kunjungan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjungpura, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Sanggau, PT. Pertamina, Universitas Tanjungpura dan Tugu Khatulistiwa.

Sedangkan dalam kunjungannya ke Provinsi Sulawesi Selatan, rombongan SSDN PPRA L Lemhannas RI ini melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kodam VII/Wirabuana, Polda Sulawesi Selatan, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Maros, PT. Semen Bosowa, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Gowa, Museum Balla Lompoa, Universitas Hassanuddin, PT. Pelindo dan Benteng Makassar.

Diharapkan dengan pelaksanaan SSDN ini agar peserta PPRA L Lemhannas RI dapat memiliki cakrawala pandang yang komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari suatu Daerah/Provinsi yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan pembangunan nasional di daerah serta kondisi ketahanan nasional Daerah/Provinsi tersebut.

Selain itu juga dapat mempertajam kemampuan peserta untuk menemukan isu-isu strategis di daerah, mendapatkan informasi, data dan fakta sebagai bahan kajian kondisi Ketahanan Nasional di daerah dan dapat memvalidasi pengukuran ketahanan nasional di daerah untuk menambah komprehensivitas bahan Seminar.



Foto : SSDN PPRA L - Kalbar



Foto : SSDN PPRA L - Sulsel

Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

Sekretaris Utama Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. membuka secara resmi acara Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba pada hari Senin (23/9) di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh para pejabat struktural Lemhannas RI, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional dan para Anggota Lemhannas RI lainnya, dengan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktur Advokat BNN Brigjen Polisi Dr. Victor Pudjiadi SpB, FICS, DFM.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama menilai sangat pentingnya sosialisasi ini agar mampu menjamin dan terhindar dari penggunaan dan peredaran narkoba. "Dengan adanya pencerahan dari BNN ini diharapkan kita semua dapat lebih memahami tentang narkoba dan mengetahui segala akibat serta konsekuensi hukum yang akan diterima bagi yang terlibat dalam hal pemakai ataupun pengedar narkoba," harap Sekretaris Utama Lemhannas RI.

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jaktranas P4GN) Tahun 2011-2015 dan Rencana Aksi Lemhannas RI dalam pencegahan penggunaan dan peredaran Narkoba.

Melihat pemberitaan di berbagai media, penggunaan dan peredaran Narkoba tak hanya menyentuh pada kelompok masyarakat, mahasiswa atau pelajar, tetapi turut menyentuh aparat pemerintah.

Oleh karena itu, Sekretaris Utama Lemhannas RI mengajak atas nama pimpinan lembaga kepada seluruh anggota Lemhannas RI termasuk keluarganya untuk menjauhi dan bebas dari penggunaan Narkoba.

Diharapkan dalam sosialisasi ini seluruh anggota Lemhannas RI dapat mengetahui dan memahami dan memiliki keterampilan untuk menolak, tidak menyalahgunakan dan tidak terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkoba.



Partisipasi Publik Dan Etika Berpolitik Penting Untuk Dioptimalkan

Roundtable Discussion bidang politik tentang “Penguatan Etika Politik guna Meningkatkan Partisipasi Publik dan Proses Demokrasi dalam rangka Ketahanan Nasional” diselenggarakan pada hari Rabu (24/9) di Gedung Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI, Jakarta.

Tema yang diangkat memiliki makna strategis, melihat permasalahan di bidang politik masih menyita perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi melihat tahun 2014 merupakan momentum dari pesta demokrasi di Indonesia.

Partisipasi publik dan etika berpolitik, menurut Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat memberikan sambutannya, merupakan dua hal yang cukup penting untuk dioptimalkan mengingat tahun 2014 merupakan tahun politik sebagai kelanjutan proses demokrasi.

“Pemilu seringkali menimbulkan suhu politik menjadi meningkat, yang diwarnai oleh perbedaan pendapat dan benturan kepentingan. Jika tidak diantisipasi, kebebasan berpolitik cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan individu, ataupun golongan yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak jarang menimbulkan diskriminasi, dan reaksi yang menimbulkan kekerasan pada sebagian masyarakat,” ucap Gubernur Lemhannas RI.

Melihat telah terjadinya anomali terhadap keadaban publik,

seharusnya fungsi perlindungan terhadap rakyat mesti dikedepankan. Peran elit politiklah yang dapat menjaga keadaban publik, termasuk menjaga wibawa hukum, kelestarian budaya, kemajuan pendidikan dan agama.

Gubernur Lemhannas RI menuturkan jika kondisi ini tidak diantisipasi akan berpotensi membuat citra demokrasi bangsa Indonesia ini menjadi kabur di mata dunia, dikarenakan etika belum dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berpolitik. Inilah yang membuat masyarakat pada umumnya kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan berakibat kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses berdemokrasi, khususnya pada saat pemilu.

Diharapkan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan ini dapat melahirkan ide-ide pemikiran strategis dan cerdas yang dapat merumuskan berbagai upaya dan langkah strategis yang mampu mendukung tercapainya tujuan nasional.

Roundtable Discussion yang dimoderatori Laksda TNI Herry Setianegara, S.Sos, SH, MM ini menghadirkan narasumber Marsdy TNI (Purn) Toto Riyanto, SH, SIP, MH, dan Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc. sebagai Pembicara, sementara Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdy TNI Dede Rusamsi, SE turut hadir sebagai Penanggap Utama selain Prof. Dr. Njaju Jenny MT Hardjatno, Prof. Dr. Sudaryono, SU dan Cecep Hidayat, MA.

Workshop "Ketahanan Nasional dan Isu Strategis"



Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Leonardi membuka workshop tentang Ketahanan Nasional di Daerah dan Pembahasan Isu Strategis Nasional dan Wilayah pada hari Rabu, (2/10) di Gedung Auditorium Lemhannas RI.

Kegiatan ini yang telah berlangsung empat kali ini semenjak tahun 2010 lalu bertujuan untuk me-review dan memvalidasi sistem pengukuran ketahanan nasional dan ketahanan nasional di daerah, menganalisis isu-isu strategis wilayah dan merumuskan rekomendasi kebijakan publik dalam rangka mengantisipasi isu-isu tersebut.

Workshop ini diikuti oleh Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari beberapa Perguruan Tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Lambung

Revitalisasi Kearifan Lokal Perkuat Karakter Bangsa

"Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara."



Hal tersebut secara lugas dinyatakan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat membuka Roundtable Discussion bidang Sosial Budaya tentang "Revitalisasi Kearifan Lokal guna Memperkuat Karakter Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional pada hari Kamis (26/9) di Gedung Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI.

Hadir dalam *Roundtable Discussion* ini, sebagai Pembicara adalah Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dra. Diah Harianti, M.Psi., Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, MA, PhD. Sementara sebagai penanggung yaitu Staf Pengajar Departemen Antropologi UI Dr. J. Emmed Madjid

Prioharyono, MA., M.Sc., Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Dr. Silverius Y. Soeharso S.E., M.M., Psi.,

Membangun manusia Indonesia yang maju dan modern adalah tujuan dari pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan, tetapi harus tetap mengakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurut Gubernur Lemhannas RI, guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan revitalisasi kearifan lokal.

"revitalisasi kearifan lokal sangat penting untuk memperkuat karakter bangsa," tegas Gubernur Lemhannas RI. Menurutnya kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Kearifan lokal sendiri merupakan salah satu produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, kearifan lokal juga merupakan sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Turut hadir dalam *Roundtable Discussion* tersebut Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Deputi Pegkajian Strategik, para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

Mangkurat, Universitas Hassanuddin, Universitas Syiah Kuala, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Pattimura.

Dalam Sambutan Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan saat membuka kegiatan tersebut, menuturkan kegiatan ini perlu diselenggarakan tiap tahunnya karena melihat situasi dan kondisi lingkungan yang begitu dinamis, memerlukan suatu sistem monitoring secara kontinyu dan dinamis, baik yang terkait dengan model, variabel, indikator maupun parameter yang dibutuhkan dalam pengukuran ketahanan nasional.

Berdasarkan pengamatan selama tiga tahun belakangan, ketahanan nasional semakin membaik, beberapa provinsi yang dalam studi tahun 2010 dan 2011 berada pada posisi kurang tangguh, kini telah meningkat posisinya menjadi cukup tangguh.

Sementara, isu-isu strategis yang kini dihadapi, masih relatif sama dalam tiga tahun terakhir ini, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antar kelompok maupun antar wilayah, konflik perbatasan, konflik horizontal dan vertikal, infrastruktur wilayah, sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal dan pelayanan kepada masyarakat yang juga belum maksimal.

Hasil dari kegiatan ini bagi Lemhannas RI dapat dijadikan sebagai



Foto : Humas Lemhannas RI

salah satu referensi dalam menyusun rekomendasi kepada Presiden RI. Keberhasilan bersama antara Lemhannas RI dengan Bappeda Provinsi, BPS dan Perguruan Tinggi dalam merumuskan isu strategis dan rekomendasi kebijakan publik ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan ketahanan nasional.

Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Lemhannas RI

Lemhannas RI melaksanakan penilaian dan peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik tingkat Pembina/Penanggung jawab dan tingkat satuan kerja pada tanggal 7 dan 10 Oktober 2013.

Penilaian ini merupakan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan sejalan dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada *entry meeting* pada hari Senin (7/10), Lemhannas RI telah menerima Tim Pemeriksa dan Penilai yang berasal dari Kementerian PAN dan RB RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Ombudsman RI, Indonesian Quality Award Foundation (IQAF) untuk melakukan Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Pembina / Penanggung Jawab dan Tingkat Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan di Lemhannas RI.

Pemeriksaan dan penilaian tersebut dilakukan terhadap PPID Lemhannas RI dan Pembina/Penanggung jawab Pelayanan Publik. Esensi materi penilaian terhadap PPID meliputi Visi, misi dan moto; Standar pelayanan dan maklumat pelayanan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Mekanisme pelayanan informasi; Sumber daya dan kode etik; Sarana dan prasarana pelayanan; Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Sistem informasi pelayanan publik; Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan dan Laporan akuntabilitas kinerja.

Sementara pemeriksaan dan penilaian terhadap Pembina / Penanggungjawab Pelayanan Publik, materinya meliputi Rencana strategis (Renstra) 2010 – 2014; Visi, misi dan moto Lemhannas RI; Kebijakan sistem informasi pelayanan publik; Pelayanan khusus (pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat tertentu/rentan); Pengawasan dan evaluasi pelayanan publik; Pembinaan teknis

terhadap unit pelayanan publik; Kebijakan penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta maklumat pelayanan publik; Pengelolaan pengaduan; Pengelolaan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik; Unit pelayanan K/L yang telah menerapkan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Lemhannas RI.

Dalam tahap akhirnya melalui exit meeting pada hari Rabu, (10/10), yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan dan penilaian oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam berita acara. Meskipun hasil dari Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Pembina / Penanggung Jawab dan Tingkat Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan di Lemhannas RI adalah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Lemhannas RI untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik lagi.



Foto : Humas Lemhannas RI



Olah Sistem Manajemen Nasional XXXIX PPRA L Lemhannas RI

Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) sangat perlu dipahami oleh setiap kader calon pemimpin nasional untuk menjalankan mekanisme penyelenggaraan Negara dan dapat menggerakkan seluruh tatanan untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung keberlangsungan kehidupan nasional.

Lemhannas RI sebagai sebuah lembaga yang menggembeng para kader calon pemimpin nasional, sudah seharusnya turut memberikan pemahaman kepada para peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) L tahun 2013 tentang Sistem Manajemen Nasional dengan menyelenggarakan Olah Sismennas XXXIX/39 selama empat hari.

Olah Sismennas dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dede Rusamsi, SE pada hari Selasa (8/10) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI. Olah Sismennas ini merupakan sarana pelatihan bagi para peserta dalam berperan dan bertanggung jawab sebagai aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan sesuai sistem manajemen nasional.

Kegiatan yang juga merupakan salah satu kegiatan utama dalam program

pendidikan regular angkatan di Lemhannas RI ini, juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk lebih menghayati berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh dengan mencoba mempraktikkannya dalam bentuk simulasi kerja aparatur pemerintahan.

Olah Sismennas yang juga melibatkan para Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Profesional ini mengangkat tema tentang "Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan dan

Pemangku Kepentingan terkait dalam rangka Rekrutmen Pemimpin Tingkat Nasional".

Dengan adanya Olah Sismennas ini, diharapkan para peserta mampu memecahkan masalah nasional dan mengambil keputusan secara strategis berdasarkan konstitusi. Selain itu, peserta juga dapat lebih memahami prosedur perencanaan pembangunan, mensinergikan potensi melalui koordinasi antar instansi dan proses pengambilan keputusan di Tingkat Nasional.



Konsolidasi Politik Pra Pemilu 2014 Perlu Ditingkatkan

Konsolidasi Politik Pra Pemilu 2014 guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka Ketahanan Nasional merupakan tema yang diangkat dalam Roundtable Discussion bidang Politik yang diselenggarakan pada hari Rabu, (9/10) di Gedung Astagatra Lt. IV Barat Lemhannas RI.

Roundtable discussion yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, menghadirkan narasumber yang berkompeten, sebagai pembicara adalah Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI Drs. Lutfi TMA, M.Si, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, S.P, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB. Hasanuddin, SE, MM.

Sementara, hadir sebagai penanggung jawab yaitu Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng, Direktur Utama LKBN Antara Mohammad Saiful Hadi, Direktur Keamanan Negara Baintelkam Mabes Polri Brigjen Pol Drs. Setyo Wasisto, SH dan Wakil Direktur Politik Baintelkam Mabes Polri Kombes Pol Drs. Suroso Hadi Siswoyo, M.Si.

Tahun 2014 yang merupakan tahun politik dengan akan berlangsungnya Pemilu Presiden dan Legislatif. Proses menjelang, pelaksanaan dan pasca Pemilu memiliki dampak strategis yang akan menentukan masa depan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang aman, tentram, adil dan



makmur sehingga perlu adanya penguatan konsolidasi Pra Pemilu.

Dalam dua Pemilu sebelumnya setelah pasca Reformasi yakni tahun 2004 dan 2009 yang lalu, pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dapat terlaksana secara baik dan lancar. Berbagai upaya dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan sudah mengarah pada penajaman terhadap kesiapan penyelenggaraan Pemilu yang ideal.

Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk mencapai suatu kondisi yang diharapkan, perhatian terhadap potensi-potensi yang mengancam keberhasilan pelaksanaan pemilu perlu ditingkatkan, melalui kewaspadaan serta yang terpenting adalah

dengan tetap menjalin komunikasi efektif baik antara lembaga pemerintahan, partai politik, kelompok masyarakat maupun media massa.

Konsolidasi politik Pra Pemilu 2014 harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan sampai dengan pasca pelaksanaan Pemilu, sehingga mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu, kegiatan roundtable discussion tersebut merupakan sebuah momentum bagi anak bangsa untuk memberikan sumbangsih berupa ide dan pemikiran yang tak hanya strategis, namun juga dari sisi teoritis, konseptual maupun dari sisi praktis.

Lemhannas RI – NDU Korea Terus Perkuat Hubungan Kerja Sama



Kamis (17/10), Lemhannas RI menerima kunjungan rombongan National Defense University (NDU) Korea yang dipimpin oleh Prof. Seok-Soo Lee dengan 16 orang anggota rombongan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka widyawisata sekaligus untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan Lemhannas RI.

Rombongan NDU Korea tersebut diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. di ruang tamu pimpinan dengan didampingi oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Diplomas Marsda TNI Ir. Beng Tardjani, M.Sc., Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Sulistiyanto, M.Sc., Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kolonel Laut (P) E. Estu Prabowo.

Dalam kunjungan kehormatan (*courtesy call*) tersebut, Gubernur Lemhannas RI menjelaskan secara singkat tentang profil, visi, misi dan tugas Lemhannas RI yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Prof. Seok-Soo Lee menyampaikan bahwa NDU Korea tidak hanya berkecimpung dalam bidang pendidikan, tapi juga fokus pada bidang penelitian.

Dalam rombongan NDU Korea tersebut juga terdapat seorang peserta asal Indonesia yang tengah mengikuti pendidikan di NDU Korea, yakni Kolonel TNI Iskandar Miria Munir. Lemhannas RI pada pertengahan tahun ini sudah melaksanakan kunjungan ke Korea dalam rangka Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) peserta pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 50.

Courtesy call ditutup dengan tukar-menukar cenderamata antara Gubernur Lemhannas RI dan Prof. Seok-Soo Lee. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi di ruang rapat Nusantara I, Gd. Trigatra Lemhannas RI.

Dalam acara diskusi antara lain dibahas tentang profil Lemhannas RI secara umum, isu unifikasi Korea dan keamanan kawasan serta penguatan interaksi dan kerja sama antara kedua instansi.

Acara diskusi dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Sismennas Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick dan dihadiri oleh pejabat Lemhannas RI antara lain diikuti oleh Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Iptek Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc., Dirjian Internasional Debidjianstrat Lemhannas RI Tony T. Spontana, S.H., M.Hum., Kepala Biro Kerja Sama dan Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI.

Tahun 2013 yang bertepatan dengan 40 tahun pembukaan hubungan diplomatik dan Tahun Persahabatan Indonesia-Korea diharapkan akan menjadi momentum positif untuk terus memperkuat hubungan kerja sama bilateral kedua negara, demikian disampaikan oleh Prof. Seok-Soo Lee. Lemhannas RI juga mengharapkan adanya kerja sama dalam bidang penulisan jurnal dan publikasi bersama.

Berkurban, Bentuk Solidaritas dan Kepedulian Sosial



Kamis, (17/10), Lemhannas RI melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam memperingati Hari Raya Idul Adha Tahun 1434 Hijriyah.

Rangkaian Acara penyembelihan hewan qurban yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA dihadiri Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar dan Pengkaji, dan Tenaga Profesional Lemhannas RI serta segenap pejabat struktural Lemhannas RI lainnya.

Peringatan hari raya Idul Adha Keluarga Besar Lemhannas RI tahun ini mengangkat tema "Melalui Peringatan Idul Kurban, Kita Perkuat Solidaritas Sosial Sebagai Implementasi Ketaqwaan". Penyembelihan hewan qurban ini merupakan sebuah momentum penting yang telah menjadi bagian tradisi umat Islam tiap tahunnya, dimana keyakinan dan ketaqwaan Nabi Ibrahim *Alaihi Salam* dalam menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya dapat menjadi motivasi bersama dalam untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Islam.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengungkapkan tiga makna pokok dalam berkorban, pertama, dengan

berkorban, itu merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah SWT; kedua, dengan berkorban, kita sebagai muslim diajarkan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, termasuk yang beragama lain; ketiga, dengan berkorban, keikhlasan kita diuji dan menjauhkan diri dari sifat tamak dan serakah kita, yaitu dengan menyisihkan harta yang kita miliki untuk berkorban.

"penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh keluarga besar Lemhannas RI pada hari ini, kita bukan saja melaksanakan ajaran agama sebagai bukti ketaqwaan kita kepada Allah SWT, tetapi juga mewujudkan solidaritas dan kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya", tambahnya.

Menurutnya, Kemampuan dalam merefleksikan *hablum-minallah* dan *hablum-minannas* itulah yang akan selalu menginspirasi untuk memaknai hidup dengan baik, termasuk dalam menjalankan kewajiban sebagai abdi Negara dan dapat menjadi motivasi tersendiri dalam meningkatkan kinerja yang juga merupakan ibadah, dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.